

# MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KALEIDOSKOP  
2020



# Daftar Isi



## COVER STORY:

Pada edisi kaleidoskop ini, kami mengambil momen-momen kebijakan yang penting selama tahun 2020. Momen penting ini kami gambarkan dengan roll film kamera. Roll film digunakan untuk menyimpan potret momen yang berharga dan penting sehingga menjadi kenangan yang tak terlupakan.

**MEDIA KEUANGAN** adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

**MEDIA KEUANGAN** saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



## 5 DARI LAPANGAN BANTENG

## 6 EKSPOSUR

## KALEIDOSKOP

- 8 Membarui Cara Kerja Saat Pandemi
- 14 Membingkai Asa bagi Pemulihan Bangsa
- 18 Infografik
- 20 Agar Negeri Ini Segera Pulih
- 26 Jaring Pengaman Rakyat Desa
- 32 Menjaga Sang Penyangga Ekonomi
- 38 Jalan Terang Menuju Pemulihan

## FOTO STORY

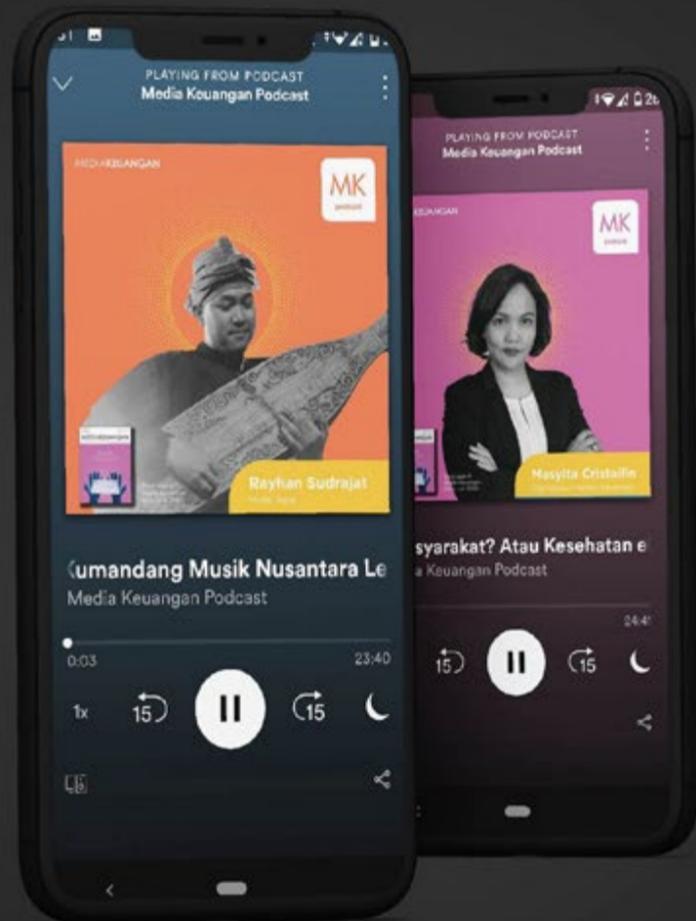
- 30 Khardung La

## UANG KITA BUAT APA

- 44 Arena Balap Nan Lengkap

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiyana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyono, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistyono. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



# Podcast Media Keuangan

Dengarkan serunya wawancara bersama para narasumber pilihan Media Keuangan

## Menyambut Tahun Baru dengan Lebih Tangguh

**J**anuari menjadi gerbang menyongsong tahun 2021. Setelah melalui tahun yang penuh tantangan dan dinamika akibat pandemi, tahun 2021 menjadi tumpuan harapan banyak pihak bahwa 2021 akan menjadi momentum pemulihan situasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

Harapan-harapan yang dipanjatkan atau bahkan dituangkan dalam catatan pribadi untuk tahun baru ini tentu menjadi doa yang memupuk optimisme dan menjadi dasar perencanaan di tahun 2021 yang lebih kokoh.

Belajar dari perjalanan pengalaman tahun 2020, adaptasi yang cepat menjadi *lesson learned* berharga yang akan kita bawa menghadapi tahun ini. Berbagai penyesuaian mulai dari penggunaan teknologi, perubahan pola kerja, sampai dengan penyesuaian APBN dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan pandemi.

Sepanjang tahun 2020, pemerintah menerbitkan beragam kebijakan yang responsif, antisipatif, dan adaptif dengan kondisi terkini demi menyelamatkan sektor terdampak pandemi COVID-19. Strategi pereda imbas pandemi tersebut terbingkai dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN secara signifikan terbukti telah mendorong perbaikan ekonomi. Kendatipun terkontraksi, namun ekonomi bertumbuh sebesar 5,05 persen dibandingkan kuartal II 2020. Sementara itu, realisasi program PEN juga menunjukkan akselerasi pencairan.

Selain itu, di tahun 2020 pemerintah bersama dewan legislatif juga telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dalam kondisi yang tak mudah. Pandemi membuat situasi samar, penuh hal tak terduga dan tak pasti. Namun, APBN 2021 diharapkan tetap menjadi

instrumen utama penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Kilas balik ulasan laporan Media Keuangan sepanjang tahun 2020 dapat Anda nikmati di edisi kaleidoskop ini.

Tahun 2020 tentunya menjadi tahun yang berharga. Setiap momen yang tak mudah akan menjadi pijakan dan bekal untuk kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Tentu saja kita akan bersyukur dalam setiap kemudahan yang kita lewati, namun kita juga lebih bersyukur atas segala kesulitan yang pernah kita hadapi karena itu membuktikan seberapa kokohnya kita. Selamat menyambut Tahun Anggaran Baru 2021!

### Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Majalah Media Keuangan  
@majalahmediakeuangan

Pada krisis pandemi tahun ini, sektor UMKM turut terkena imbas. Pembatasan aktivitas ekonomi dan pembatasan sosial menyebabkan menurunnya omzet UMKM.

Menurut Anda, kebijakan mana yang harus lebih diingatkan untuk

membantu sektor UMKM bertahan dalam kondisi ini?

- A. Kesehatan agar permintaan kembali Pulih
- B. Insentif seperti subsidi bunga, bantuan produktif, dll.
- C. Peningkatan kualitas dan

Jika menjadi Menteri Keuangan, program mana yang akan Anda beri alokasi anggaran terbanyak dan mengapa?

**@rizal.doe:**  
B. Bantuan modal dapat membantu UMKM melakukan akselerasi bisnis berupa inovasi agar tetap beroperasi.

**@wd\_amrynt:**  
B. Karena masyarakat belum dinamis dan fleksibel untuk memulai sesuatu mandiri

**@fith101:**  
B. UMKM harus bs bertahan hidup dulu baru kemudian meningkatkan kualitas dll



## Vaksin Telah Tiba

Foto Krena Karisma Suhartono Teks Anas Nur Huda

Kabar baik dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan datangnya 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech Ltd, China, di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (6/12). Kementerian Keuangan turut mendukung penanganan COVID-19, salah satunya dengan mempercepat kedatangan vaksin Sinovac dalam bentuk alokasi anggaran penyediaan vaksin pada APBN 2020 dan kemudahan fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam pengadaan vaksin berupa fasilitas pembebasan bea masuk atau cukai, tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah, serta pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22. Diharapkan dengan adanya kedatangan vaksin ini, pandemi COVID-19 akan segera berakhir sehingga perekonomian bisa pulih kembali.

# Membarui Cara Kerja Saat Pandemi

Teks Dara Haspramudilla

Pandemi membawa perubahan di segala lini. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pun berubah, begitu pula dengan cara bekerja. Dulu, bekerja dari rumah atau dari mana saja masih menjadi impian bagi kaum yang mendambakan keseimbangan ideal antara kehidupan dan pekerjaan. Saat ini, impian itu nyata adanya. Covid-19 lah yang memaksanya. Organisasi pun berbenah menyesuaikan agar tidak terlindas zaman.



Kemenkeu menjadi salah satu institusi yang cepat beradaptasi dengan mengusung NTOW

Foto  
Faishal  
Chairu Noor

**K**ementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menjadi salah satu institusi yang cepat bergerak beradaptasi. Sejak 2018, Kemenkeu sudah menggagas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dengan mengusung konsep “New Thinking of Working” (NTOW). NTOW sebagai pondasi tema sentral inisiatif strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. NTOW menopang implementasi *office automation* dalam rangka membangun *digital workplace*, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), dan *modern e-learning* sebagai alat utama pengembangan SDM.

Konsep yang rencananya diimplementasikan penuh pada tahun 2024 nanti, justru mengalami percepatan dan direalisasikan di tahun 2020. Pengembangan MyTask Generasi Pertama dan presensi pada Office Automation (OA) untuk mendukung pelaksanaan FWS dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari. Ini adalah salah satu hikmah pandemi.

“Jadi, saya melihat sisi positifnya, kita didorong mempercepat terwujudnya hal yang kita gagas dua tahun lalu. Pertama, Activity Based Workplace di mana ruang kerja dibuat terbuka agar diskusi lebih cair, lebih kolaboratif, dan produktif. Kedua, *flexible working hour*, waktu yang biasanya dihabiskan di jalan bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Kitapun dipaksa untuk lebih independen untuk bisa mengatur waktu yang produktif. Ketiga, *flexible working space* di mana kita bisa bekerja dari kantor di luar tempat kita bertugas,” tutur Sudarto, Staf Ahli Bidang



Bekerja dari rumah tidak serta merta mengurangi produktivitas kerja

Foto Daryono

Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi.

#### Implementasi cara kerja baru

Pada bulan Juli 2020, hasil riset McKinsey juga memperlihatkan percepatan implementasi transformasi digital sebagai dampak pandemi COVID-19 menjadi lebih cepat 6-7 tahun. Implementasi *remote working* yang sebelum pandemi direncanakan selesai dalam waktu 454 hari, terealisasi dalam waktu 10,5 hari. Hal ini memperlihatkan multiplikasi akselerasi sebanyak 43 kali dan ini juga terjadi pada implementasi lainnya seperti layanan digital, penggunaan data, IT, manajemen

data, semuanya direalisasikan lebih cepat dari yang diproyeksikan.

Lalu apa saja pemutakhiran yang sudah dilakukan Kemenkeu sejak bekerja dari rumah diberlakukan? Ke depannya, pola kerja baru sudah tidak bisa menjadi gagasan lagi, namun menjadi *new normal*. Inisiatif strategis NTOW yang sudah berjalan akan menjadi “New Ways of Working” (NWOW) untuk mempersiapkan pola kerja baru di Kemenkeu yang produktif dan berkesinambungan. Beberapa kebijakan akan diterapkan dalam rangka penguatan implementasi di tahun 2021. Kebijakan tersebut mencakup penerapan kebijakan *flexible working*

*arrangement* dengan lebih permanen. Selain itu, program dukungan kepada pegawai untuk bisa bekerja secara *remote* juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah dalam bentuk kepemilikan *end user devices*.

Inisiatif strategis *Office Automation* (OA) pun mengalami perkembangan pesat. Sistem e-kemenkeu dengan cepat mengakomodasi *remote working* selama pandemi. Penguatan ke depan terkait otomasi proses bisnis manual ke dalam modul-modul OA, termasuk naskah hukum yang ditetapkan dalam lingkup Kementerian Keuangan yang dapat diakomodasi dalam Nadine versi update Dalam OA sudah ada beberapa

menu yang memudahkan para pegawai untuk bekerja di mana saja. Sebagai contoh, menu “Tugas Saya”. Menu ini merupakan *technology enablers* yang mendukung sistem kerja baru. “Tugas Saya” memfasilitasi monitoring pekerjaan tim oleh pimpinan. Ke depan modul e-Kemenkeu ini akan terus di-refine termasuk dalam mendukung pola kerja pegawai setelah *delaying*” terang Sudarto.

#### FWS dan produktivitas kerja

Bekerja dari rumah tidak serta merta mengurangi produktivitas kerja. Hal ini terlihat dari hasil survei *work from home* tahap II yang dilakukan oleh

Survey McKinsey

454

Jumlah hari untuk Implementasi *remote working* yang sebelum pandemi direncanakan selesai

10,5

Jumlah hari dalam merealisasikan implementasi *remote working*

43

multiplikasi akselerasi sebanyak 43 kali

Central Transformation Office (CTO), Kemenkeu di bulan Juli 2020. Survei ini merupakan kalibrasi dari survei tahap I yang dilakukan di bulan April 2020.

“Survei WFH tahap II menunjukkan hasil bahwa sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan secara daring dengan beban kerja yang relatif sama. Dari sisi efektivitas pun dinilai meningkat. Kemudian, muncul juga aspirasi mengenai *output based performance*. Namun, hal yang masih perlu ditingkatkan yakni dari sisi kesadaran mengenai keamanan teknologi informasi,” ungkap Sudarto.

Ketika ditanya apakah FWS berpengaruh pada penurunan

pencapaian, Psikolog Alexander Srijewijono mengiyakan. Namun demikian, hal tersebut sangat wajar apalagi jika terjadi pada waktu penyesuaian pola kerja.

“Bahkan ketika bekerja di kantor, kalau kita pakai kurva, pasti ada yang *high performer*, ada yang *medioker*, ada yang *low performer*. Saya lihat ketika FWS di beberapa organisasi memang terjadi penurunan. Di sinilah peran *leader* untuk membuat strategi agar performa tidak terpengaruh,” ucapnya.

Alex juga menambahkan bahwa penurunan wajar terjadi dalam masa penyesuaian.

“Masa bulan madu untuk FWS jika dampaknya fatal pada organisasi tidak boleh lebih dari tiga bulan. Jika ada perlambatan proses atau hasilnya turun, berarti pimpinan organisasi perlu mereview strategi sistem dan mekanisme agar bisa naik kembali. Nah, ketika lebih dari tiga bulan masih terjadi penurunan berarti *leadership* nya nggak jalan, berarti proses latihan organisasinya juga nggak jalan,” tambahnya.

#### Kematangan adalah kunci

Menurut Alex jika FWS sudah dikaji dan diujai sejak 2018 artinya Kemenkeu bisa dikatakan sudah memiliki kematangan organisasi.

“Banyak organisasi yang kemudian tahu-tahu langsung menjalankan *flexible working hours* tanpa mempelajari dulu. Secara psikologis, jika melihat FWS hanya dari sisi keren atau kekinian, organisasi tersebut hanya sekedar latak. Nah, jika di Kemenkeu sudah dikaji dan diujai dari 2018 artinya sudah terlihat kematangannya,” tutur Alex.

Dalam mengimplementasikan FWS, kata kunci yang harus dipegang adalah “kematangan”. Ada dua kematangan yakni dari sisi organisasi dan juga pegawai. Kematangan organisasi melihat seberapa kuat arahan kepemimpinannya dan strateginya. Jika itu sudah dimiliki

organisasi maka FWS akan berjalan dengan baik.

“Organisasi yang matang dapat dilihat dari distribusi *leadership*-nya. Apakah *leadership*-nya tersentralisasi atau terdesentralisasi? Jika selama ini kewenangan sudah ditentukan dan sudah terdistribusikan dengan baik, pada saat FWS tinggal diteruskan.

Inisiatif strategis NTOW yang sudah berjalan sesuai target akan disesuaikan menjadi "New Ways of Working" (NWOW) berkaitan dengan implementasi *remote working* yang sudah berjalan. Beberapa kebijakan akan diterapkan dalam rangka penguatan implementasi di tahun 2021



Sudarto  
Staf Ahli OBTI

Kita juga bicara dari mekanisme pengambilan keputusan. Perlu ditelaah apakah kemudian proses pengambilan keputusannya menjadi lebih lambat, menjadi *compliance* juga ada yang terpengaruh? Itu juga yang harus dianalisa oleh organisasi,” jelas Alex.

Sementara itu, kematangan pegawai juga memiliki peran vital.

Seberapa dapat dipercaya pegawai jika bekerja tanpa dilihat atasannya? Seberapa ia bisa diandalkan selama jam kerja? Seberapa baik hubungan satu sama lain selama tidak saling bertatap muka? Jawaban dari ketiga pertanyaan itu kemudian bermuara pada faktor pembagiannya yakni orientasi. Kita bisa mempertanyakan kembali seberapa jauh dia memprioritaskan pekerjaan ketika jam kerja?

“Bayangkan ada karyawan yang jago, kredibilitasnya oke, *reliability* oke, intimasinya oke, orangnya juga ramah. Tetapi begitu FWS, ternyata presentase dia bekerja itu lebih banyak untuk mengurus bisnis atau kepentingan pribadi lainnya. Kalau dia ketahuan seperti itu, tingkat kepercayaan atasan juga jadi berkurang,” ujar pendiri Daily Meaning ini.

#### Tanggung jawab bersama

FWS itu dapat dikatakan adalah “*what*” sementara elemen kematangan ini adalah “*how*”. Agar FWS dapat berjalan baik tentu saja kematangan baik organisasi maupun pegawai harus berjalan beriringan sebab ini menjadi tanggung jawab bersama.

“Seorang *leader* juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin FWS berjalan optimal. Harus bisa mengenali dan memetakan kematangan pegawai di bawahnya dan memikirkan jika ada kemampuan yang harus ditingkatkan. Aturan main juga harus jelas seperti seberapa jauh pegawai bisa dijangkau saat dikontak. Misalnya, harus betul-betul bisa dihubungi dari jam 8 sampai jam 5, setelah itu lebih fleksibel,” tutur Alex.

Hal senada juga disampaikan Sudarto. Menurutnya *leadership* menjadi kunci dalam penerapan FWS yang kemudian harus diikuti oleh budaya organisasi. Di Kemenkeu sendiri arahan pimpinan sangat jelas yakni mengkapitaliasi situasi pandemi dalam rangka reformasi birokrasi.



Leadership menjadi kunci dalam penerapan FWS yang kemudian harus diikuti oleh budaya organisasi

Foto  
Biro KLI

“Kuncinya adalah *leadership* selanjutnya kultur. Kalau sudah dua hal itu kita bangun, semuanya akan mengikuti. Nantinya juga kita akan kunci dengan KPI individual sehingga keterkaitan kontribusinya dengan *output* organisasi semakin dapat terlihat. Tiap hari pegawai harus mengerjakan sesuatu dan memiliki output. Inipun tidak akan lepas dari peran pimpinan dalam mensupervisi dan *coaching*,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kemenkeu adalah institusi yang terbiasa menghadapi perubahan. Dengan demikian, diharapkan perubahan budaya kerja saat pandemi

dapat dengan baik dilalui.

“Pastinya jika kita melakukan transformasi berbasis digital akan berdampak, tetapi Kemenkeu sudah sangat terbiasa melakukan reformasi, berubah organisasinya. Banyak dari kita terdampak positif terhadap perubahan itu sudah biasa, sepanjang keinginan pegawai dan organisasi terpenuhi. Namun, tidak mungkin kita memenuhi keduanya secara utuh, pasti ada *balancing*. Contohnya, di perbendaharaan, dulu pegawainya ada 13 ribu, sekarang tinggal 7 ribu,” ungkapnya.

Menjalani FWS tidaklah semudah membalik telapak tangan. Membangun komitmen pegawai perlu dilakukan

untuk menjaga produktivitas kerja. Membentuk kesamaan persepsi antara organisasi dan pegawai mengenai tujuan dari FWS juga sangat krusial. Pesan yang jelas dari pucuk pimpinan ke pegawai harus disampaikan agar FWS menjadi budaya dan kepentingan bersama yang dipahami semua pihak. Jika kita tahu jelas alasan untuk melakukan sesuatu tentu saja kita akan memiliki daya juang lebih dalam menghadapi tantangan yang mengemuka. Seperti yang ditulis Friedrich Wilhelm Nietzsche, “*When one has one's wherefore of life, one gets along with almost every how*,” dalam ‘Apophthegms and Darts’, Twilight of the Idols and the Antichrist (1889).



# Membangkai Asa bagi Pemulihan Bangsa

Teks CS. Purwowidhu

Tak ada satupun negara di dunia yang siap berhadapan dengan pandemi COVID-19. Masing-masing negara menggencarkan strategi untuk bertahan melewati krisis, termasuk Indonesia. Pemerintah pun menerbitkan beragam kebijakan yang responsif, antisipatif, dan adaptif dengan kondisi terkini demi menyelamatkan sektor terdampak pandemi COVID-19. Strategi pereda imbas pandemi tersebut terbingkai dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tak hanya menekan angka pertumbuhan, serangan pandemi COVID-19 berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia

Foto  
iStock

**D**unia mengalami kontraksi ekonomi sangat dalam akibat pandemi COVID-19. IMF memprediksi kontraksi ekonomi global hingga -4,9 persen. Bank Dunia mematok angka lebih rendah di kisaran -5,2 persen. Ekonomi Indonesia pun tak luput dari kontraksi. Data BPS mencatat laju ekonomi kuartal I 2020 hanya 2,97 persen atau terkontraksi 2,41 persen dibanding kuartal IV 2019. Pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi terperosok lebih dalam, -5,32 persen.

Tak hanya menekan angka pertumbuhan, serangan pandemi COVID-19 berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penduduk miskin bisa bertambah antara 3,02 hingga 5,71 juta orang. Angka pengangguran dapat meningkat hingga jutaan.

#### Ekonomi pandemi

Di tengah ketidakpastian kondisi akibat pandemi, pemerintah segera mengambil langkah melalui Program PEN untuk menyelamatkan rakyat. “*Whatever it takes* (apapun yang diperlukan), itu prinsip utama, tapi dalam konteks kita mau melindungi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kita berupaya memberikan kebijakan yang benar-benar bisa berdampak kepada masyarakat, itu fokus kita,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Senada dengan Febrio, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, “Saya bilang ini ekonomi pandemi. Ekonomi pandemi itu ekonomi yang dikerahkan dengan segala daya upaya untuk mengalahkan pandemi, dan dampak pandemi itu.” Tak semata kesehatan, namun juga dampak lain yang mengikutinya. “Kalau kesehatan kena, (lantas) tidak tertangani dengan baik akan menciptakan dampak sosial. Dampak sosial yang eskalasinya

meninggi, tidak bisa diatasi akan menimbulkan dampak ekonomi, krisis. Ketika krisis terjadi, dampak sosial akan lebih besar lagi, lalu kolaps secara ekonomi nasional,” tuturnya.

Alih-alih menjadikan ekonomi sebagai panglima, Yustinus menerangkan kebijakan PEN justru

*“Whatever it takes” (apapun yang diperlukan), itu prinsip utama, tapi dalam konteks kita mau melindungi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kita berupaya memberikan kebijakan yang benar-benar bisa berdampak kepada masyarakat, itu fokus kita”*



**Febrio Kacaribu**  
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

mendudukan kembali ekonomi pada perspektif asalnya, yakni ihwal kelangsungan hidup. “Ekonomi itu ya soal *survival*. Soal hidup orang. Soal bagaimana pelaku UKM bisa berjualan lagi, orang yang di-PHK itu bisa makan, itu adalah ekonomi,” lugasnya. Karena itu, program PEN setidaknya mencakup tiga hal utama yakni penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.

#### Pulih di segala sisi

Di samping bertujuan menangani kesehatan, program PEN dirancang

untuk dapat memulihkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Pertolongan diberikan seturut urgensi kepentingan. Sektor yang paling rentan yang paling pertama ditolong.

Pemulihan sisi permintaan dimulai dengan membantu rumah tangga masyarakat dari lapisan terbawah sampai menengah melalui beragam program perlindungan sosial misalnya Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai.

Demikian pula pemulihan di sisi penawaran. Pemberian bantuan untuk sektor usaha diawali dari segmen usaha paling rentan yaitu UMi dan UMKM antara lain melalui Bantuan Produktif Ultra Mikro, subsidi bunga, dan penempatan dana di bank mitra. Logika serupa pun dipakai kala menerapkan kebijakan kredit modal kerja untuk korporasi. Sektor pariwisata, perdagangan, dan usaha padat karya yang terhantam cukup keras didahulukan untuk menerima bantuan. Keseluruhan skema PEN perlahan mendorong aktivitas perekonomian agar kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dalam.

#### Efektif karena adaptif

Untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur dan rincian APBN 2020 sebagai tindak lanjut dari Perpu 1/2020. Awalnya belanja negara APBN 2020 sebesar Rp2.540,42 triliun disesuaikan menjadi Rp2.613,82 triliun melalui Perpres 54/2020. Namun, melihat perkembangan hari demi hari dampak pandemi dan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan muncul ke depan, penyesuaian postur APBN kembali dilakukan. Belanja negara kemudian ditetapkan sebesar Rp2.739,16 triliun melalui Perpres 72/2020. Pemerintah juga memperlebar defisit



Pemberian bantuan untuk sektor usaha diawali dari segmen usaha paling rentan yaitu UMi dan UMKM

Foto  
Anas Nur Huda

menjadi 6,34 persen agar dapat mengekstensifikasi penanganan pandemi dan imbasnya.

“Karena kita sudah melakukan disiplin fiskal yang cukup ketat selama bertahun-tahun, sehingga rasio utang kita rendah maka itu membuat kita punya ruang untuk melakukan pelebaran defisit sampai tiga tahun,” ungkap Febrio.

Menjelang akhir kuartal III 2020, Program PEN secara signifikan mendorong perbaikan ekonomi. Kendatipun terkontraksi -3,49 persen namun ekonomi bertumbuh sebesar 5,05 persen dibandingkan kuartal II 2020. Sementara itu, realisasi program PEN juga menunjukkan akselerasi pencairan. Penyerapan belanja PEN tumbuh 29,4 persen per bulan. Hingga 14 Desember 2020, tercatat penyerapan dana sebesar Rp483,62 triliun atau 69,6

persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

#### Menata data

Tantangan pemulihan ekonomi nasional tidak luput dari perkara data. Misalnya, terkait skema khusus bagi pelaku UMKM yang *unbankable*, Tauhid Ahmad, peneliti senior INDEF berpendapat bahwa kondisi itu tidak serta merta dapat dicapai tanpa pendataan yang memadai. Lantas terkait bantuan sosial, ia beranggapan bahwa data yang dijadikan basis pendistribusian yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak lagi relevan dengan kondisi lapangan. “Pemerintah perlu memperkuat integrasi bantuan dalam “satu pintu” dengan menggabungkan dan verifikasi data dari berbagai sumber,” saran Tauhid.

Perihal data, Febrio menjelaskan perbaikan data yang dijadikan acuan terus dilakukan pemerintah. Data yang andal, menurutnya, akan menopang program perlindungan sosial yang kredibel. “Datanya tidak sempurna sudah pasti, tapi itu memang data terbaik yang kita punya. Dan, sementara ini kita memang butuh gerak cepat. Kalaupun ada *inclusion-exclusion error* relatif kita tolerir, sepanjang ini programnya memang arahnya ke masyarakat yang membutuhkan,” terang Febrio.

#### Agar tetap kondusif

Pemerintah terus berupaya memperbaiki implementasi program PEN antara lain dengan memperpanjang pelaksanaan beragam program sampai dengan Desember 2020, *redesign* program agar lebih efektif, dan mempercepat proses usulan baru berbagai kluster serta realisasinya. Monitoring dan evaluasi (monev) PEN rutin dilaksanakan. Selain melakukan monev secara harian dan berjenjang di internal, Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI) dalam pengendalian program PEN. Monev membahas perkembangan pelaksanaan program, identifikasi permasalahan dan perumusan solusi untuk mengakselerasi dan mendorong efektivitas program.

Penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tersimpul dalam satu bingkai besar sehingga perlu diorkestrasi dengan baik supaya berhasil. “Kalau aktivitas ekonominya jalan tapi kita tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan ya risikonya terlalu besar. Intinya ini benar-benar memang harus kombinasi dari disiplin masyarakat dan kebijakan yang benar dan efektif. Keduanya harus jalan bersama dengan seimbang,” pungkas Febrio.

# Kilas Balik Kemenkeu 2020

17 Januari 2020

Executive Gathering  
Kemenkeu bertemakan  
"Merawat Keberagaman  
Untuk Indonesia Maju"



3 Maret 2020

50 tahun kerjasama  
antara Indonesia dan  
Asian Development Bank  
(ADB)



27 Juli 2020

Kemenkeu mendapat  
opini WTP



17 Agustus 2020

Peluncuran uang  
peringatan kemerdekaan  
75 tahun Republik  
Indonesia



22-23 Februari 2020

Pertemuan G20 di Arab Saudi  
dengan kesepakatan untuk  
mencapai pertumbuhan ekonomi  
global yang kuat



31 Maret 2020

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun  
2020 untuk menghadapi situasi  
tidak biasa (extraordinary) akibat  
pandemi Covid-19.



14 Agustus 2020

Penyerahan RAPBN 2021 dan  
Nota Keuangan telah diserah-  
kan Presiden kepada DPR RI



25 September 2020

RAPBN 2021 disepakati  
DPR



14 Oktober 2020

Wisuda PKN STAN 2020  
Secara virtual



25 November 2020

Penyerahan DIPA dan  
TKDD Tahun Anggaran 2021



10 Desember 2020

Webinar Hakordia 2020 :  
"Korupsi itu Seperti Covid-19,  
Bisa Menular dan Membahaya-  
kan Institusi!"



31 Oktober 2020

Peringatan HORI ke-74 yang  
bertemakan peduli, responsif,  
adaptif atasi pandemi,  
bangkitkan ekonomi.



30 November 2020

Kemenkeu Mengajar V  
diselenggarakan secara virtual  
serentak diseluruh Indonesia





# Agar Negeri Ini Segera Pulih

Teks Dimach Putra

Detik demi detik tak terasa terus berlalu. Warga Indonesia telah memasuki bulan ke sembilan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Virus ini tak hanya merenggut ratusan ribu nyawa di Indonesia, banyak hal lainnya yang turut terkena imbasnya. Di penghujung tahun 2020, kabar kedatangan vaksin penawar virus memenuhi tajuk utama di berbagai media pemberitaan. Adanya vaksin dianggap mampu segera membebaskan Indonesia dari belenggu pandemi. Benarkah?

Kedatangan vaksin menjadi titik balik pemulihan ekonomi Indonesia

Foto  
Anas Nur  
Huda

“Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu kabar baik, satu

kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19,” begitu kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan konferensi pers daring kedatangan vaksin COVID-19, 6 Desember silam. Presiden kemudian menyampaikan lebih lanjut tahapan kedatangan vaksin yang ditunggu-tunggu ini. Presiden menyebut sebanyak 1,8 juta dosis lainnya juga sedang diupayakan pemerintah agar bisa tiba di tanah air Januari mendatang.

Selain dalam bentuk jadi, presiden juga mengungkapkan rencana kedatangan 15 juta dosis bahan baku vaksin pada bulan ini, disusul 30 juta dosis tambahan pada awal tahun 2021. Bahan baku tersebut nantinya akan diolah oleh Biofarma. Perusahaan farmasi pelat merah ini juga yang melaksanakan uji klinik vaksin produksi Sinovac ini di Bandung, Agustus silam.

Datangnya penawar COVID-19 ini mungkin menjadi kabar yang paling ditunggu banyak orang sepanjang tahun 2020 ini. Tak heran jika Jokowi harus menekankan frasa “kabar baik” yang diulangnya dua kali dalam pidato pembukanya itu. Namun, presiden juga mengingatkan agar masyarakat sedikit bersabar lagi menunggu izin distribusi vaksin ini keluar. Perlu lampu hijau dari Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) yang tentunya harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan terlebih dahulu. “Kita amat bersyukur, Alhamdulillah, vaksin telah tersedia,

artinya kita bisa segera mencegah (semakin) meluasnya wabah COVID-19,” ucap Presiden.

#### Dukungan penganggaran untuk kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani turut menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini di bidang anggaran kesehatan. Menkeu menyampaikan realisasi hingga 25 November 2020, serta anggaran yang telah disiapkan di tahun 2021. Seperti kita tahu, anggarannya tahun ini lebih difokuskan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sebagai salah satu komponen dalam PEN, anggaran kesehatan telah terserap 41,2 persen dari pagu senilai Rp. 97,9 triliun. Realisasi sebesar Rp. 40,32 triliun tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program turunan di bidang kesehatan. Fokus utamanya untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 727,4 ribu personel dan telah dibayarkan sebesar Rp. 7,69 Triliun. Kedua, santunan kematian sebesar Rp 40 miliar telah disalurkan kepada sekira 200 nakes yang gugur menjalankan tugas.

Fokus ketiga adalah biaya penanganan oleh Gugus Tugas COVID-19 sebesar Rp 3,22 triliun. Berikutnya, Rp 3,82 triliun juga telah diberikan untuk insentif perpajakan bagi bidang kesehatan. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa di tahun anggaran 2020 ini pemerintah mencadangkan Rp. 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin. Program vaksinasi tersebut tentu baru akan dimulai



Sebagai salah satu komponen dalam PEN, anggaran kesehatan telah terserap 41,2 persen dari pagu

Foto Resha Aditya Pratama



Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO

Foto  
Andi Al Hakim

pelaksanaannya di tahun 2021. Untuk itu, selain yang telah dicadangkan tadi, tahun 2021 juga dianggarkan untuk mendukung penuh keberlangsungan program tersebut.

“Total anggaran kesehatan mencapai 169,7 Triliun Rupiah di mana untuk vaksin dan penanganan covid sebesar Rp. 60,5 Triliun Rupiah untuk tahun 2021,” sebut Menkeu. Rincian anggarannya adalah Rp. 18 triliun sebagai antisipasi pengadaan vaksin COVID-19, Rp. 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya. Sementara itu, Rp. 1,3 triliun dianggarkan untuk pembelian sarana prasarana laboratorium bank dan PCR yang pengadaannya akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Pemerintah juga tetap mencadangkan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk kelas III bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pada pidatonya tersebut Menkeu sangat mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah mendukung keseluruhan pelayanan impor vaksin. Dukungan dari direktorat di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tentunya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 188. “Kami akan terus mendukung dari sisi penganggaran dan tentu dari sisi perencanaan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, terutama yang akan dibayar oleh pemerintah,” terangnya menutup pidato.

#### Perjuangan belum berakhir

Per 6 Desember 2020 terdapat 575.796 kasus terkonfirmasi. Jumlah kasus sembuh sebanyak 474.449 dengan *recovery rate* 82,5 persen. Angka kematian 17.740 dengan *case fatality rate* 3,08 persen. Data perkembangan kasus COVID-19 itu dilaporkan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam acara konferensi pers

tersebut. “Untuk itu perlu segera dilakukan intervensi, tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit ini melalui upaya vaksinasi,”

“Total anggaran kesehatan mencapai 169,7 Triliun Rupiah di mana untuk vaksin dan penanganan covid sebesar Rp. 60,5 Triliun Rupiah untuk tahun 2021”



Sri Mulyani Indrawati  
Menteri Keuangan

ucap Terawan.

“Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO,” jamin Menkes. Ia juga menjelaskan bahwa vaksinasi

adalah salah satu bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Terawan menyampaikan bahwa setelah sampai, vaksin ini akan segera dilakukan persetujuan untuk mendapatkan *emergency use authorization* oleh BPOM sesuai dengan saintifik dan peraturan perundangan. Sejalan dengan itu, pemeriksaan kualitas vaksin juga dipastikan agar vaksin yang diterima dan nantinya diedarkan semua dalam kondisi baik. Pengisian dokumen dilakukan dengan teliti dan benar sesuai hasil pemeriksaan fisik vaksin agar dipastikan vaksin, dari kemasan dan terutama isinya, diterima dalam kondisi baik.

Biofarma sebagai importir vaksin berjenis SARS COV 2 (Verocel) tersebut juga memastikan bahwa kendaraan pengangkut vaksin dari bandara serta gudang penampungannya sesuai dengan standard sistem logistik rantai dingin. Tujuannya agar vaksin disimpan pada suhu tertentu selama proses tersebut agar tetap terjaga kualitasnya. Nantinya, distribusi vaksin ini akan diberikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi lalu dilanjutkan ke Dinkes kota dan kabupaten di bawahnya. Vaksin gelombang pertama ini akan diberikan untuk nakes, asisten nakes, tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan yang datanya telah ada dalam sistem informasi yang telah disiapkan.

Sembari menunggu *clearance* untuk pendistribusian vaksin, Terawan tak lelah mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan. Perang melawan wabah ini adalah perjuangan bersama antara pemerintah dan segenap warga masyarakatnya. “Semoga vaksinasi dapat segera dilaksanakan, berjalan baik, tepat waktu dan lancar dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi,” pesan Menkes.



# Jaring Pengaman Rakyat Desa

Teks Aditya Wirananda

Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, pemerintah menetapkan penggunaan dana desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial (JPS). Dana desa direalokasi sebagai bantuan langsung tunai dana desa (BLT Desa). BLT Desa ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun.

Dana Desa diprioritaskan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, berupa kegiatan penanganan pandemi dan jaring pengaman sosial di desa

Foto Angga Rindra



Penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program padat karya diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah kemerosotan ekonomi masyarakat desa

Foto Resha Aditya

**P**rogram BLT Desa merupakan program lintas K/L yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, nominal bantuan yang diterima adalah Rp1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp2,7 juta yang disalurkan selama enam bulan.

Kenaikan nominal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes termasuk memperluas cakupan KPM. Menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia, Moh. Faisal, secara konsep program ini sangat bagus sebab dana langsung disalurkan

ke desa. “Selama ini beberapa bantuan sosial diberikan top-down dan dalam perjalanannya menuju penerima ada banyak distorsi. BLT Desa ini uangnya langsung diterima dan dikelola desa sehingga memotong banyak distorsi tadi,” ujarnya.

#### Menjaga daya beli

Kebijakan keuangan negara pada masa pandemi mengakibatkan Dana Desa tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp71,19 triliun dari sebelumnya Rp72 triliun. Karenanya, Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Adriyanto mengungkapkan pihaknya melakukan revisi terhadap PMK 205/2019 tentang pengelolaan Dana Desa. PMK 50/2020 merupakan revisi kedua yang mengatur relaksasi persyaratan, tahapan

penyaluran, serta prioritas penggunaan Dana Desa.

“Dana Desa diprioritaskan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, berupa kegiatan penanganan pandemi dan jaring pengaman sosial di desa,” ujar pria yang meraih gelar Ph.D dari Australian National University itu. Relaksasi persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa dilakukan untuk mempercepat penyaluran. “Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Dana Desa difokuskan untuk BLT Desa sampai jangka waktu 6 bulan dan kami tidak membatasi jumlah Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT,” tutur Adriyanto.

Langkah DJPK ini ialah bentuk

tindak lanjut dari arahan Presiden sebelumnya. Dalam rapat terbatas, Presiden mengatakan penanganan pandemi COVID-19 bisa melalui dua cara. Pertama penyaluran bantuan sosial. Kedua, pelaksanaan program padat karya. Kedua program itu diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah kemerosotan ekonomi yang sudah dirasakan masyarakat desa sejak awal pandemi merebak. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari semula tiga bulan, BLT Desa kemudian diperpanjang menjadi enam bulan.

Bantuan dengan besaran Rp600.000 untuk bulan pertama sampai ketiga dan Rp300.000 untuk bulan keempat sampai ke enam per KPM ini diharapkan mampu menjadi solusi. “Perpanjangan pemberian BLT Desa juga merupakan arahan Presiden untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat secara lebih luas supaya dapat menjaga daya beli masyarakat desa di tengah merosotnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19,” tambah Adriyanto. Pandemi mungkin masih berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan bisa jadi bertambah. Demikian pula dengan jumlah penduduk miskin di desa. Tujuan perpanjangan ini sangat jelas, supaya masyarakat miskin dapat terbantu dalam jangka waktu yang lebih lama dan mampu bertahan.

Sampai dengan 30 November 2020, realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp65,09 triliun atau 91,44 persen dari pagu alokasi. Capaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 81,76 persen dari pagu alokasi.

#### Tantangan penyaluran

Dalam hal penyaluran, Nata

Irawan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menyatakan persoalan kelengkapan persyaratan tak jarang menjadi kendala dalam penyaluran BLT Desa. Namun demikian, setelah adanya relaksasi penyaluran yang diinisiasi Kemenkeu, BLT Desa saat ini dapat disalurkan lebih cepat. Selain itu,



kendala lainnya adalah terkait geografis. “Ada desa yang dalam menjangkaunya membutuhkan biaya transportasi tinggi untuk proses pencairan. Ditambah lagi, adanya keterbatasan layanan perbankan di sana,” tuturnya.

Dari aspek pencairan dana, Kepala KPPN Denpasar Sri Martini menyatakan tidak ada kendala berarti. “Tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi oleh KPPN Denpasar secara internal dalam menyalurkan Dana Desa tahun 2020 yang penggunaannya diantaranya untuk keperluan BLT Desa,” terang Sri Martini. Justru, menurutnya, pihak yang

mengalami kendala adalah desa dan Pemda. Tambahnya, “Proses verifikasi membutuhkan waktu guna menetapkan calon penerima BLT Desa bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Karu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.”

Sedangkan, dari sudut pandang lain terkait geografis, Faisal menuturkan bahwa sebaiknya jumlah nominal bantuan tidak disamaratakan. “Nominal bantuan saat ini jika di Jawa itu jelas cukup, tetapi kalau kita berpikir sampai ke daerah seperti di Maluku atau Papua jelas saja nilai itu tidak ada artinya,” jelasnya. Faisal menambahkan persoalan integritas juga menjadi tantangan dari program bantuan sosial ini. “Keluhan yang datang terkait penyaluran yang tidak tepat sasaran yang kerap kali pemilihan penerima didasarkan subjektivitas kepala desa. (Kesuksesan) penyaluran BLT Desa ini sangat bergantung pada perangkat pedesaan”, ungkapnya.

#### Pentingnya sinergi

Nata mengatakan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung dengan sinergi antarpihak. “Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu berperan aktif dalam memfasilitasi dan mendampingi desa dalam pelaksanaan BLT Desa sehingga kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel”, terangnya.

Senada dengan itu, Faisal juga berpendapat bahwa kesuksesan program ini dipengaruhi oleh kerja sama dan koordinasi kementerian dan lembaga terkait. “Saya tahu Kemenkeu menyediakan dari sisi dananya, tetapi kesuksesan program ini memang sangat banyak dipengaruhi oleh institusi lain. Jadi, persoalannya bukan hanya seberapa besar stimulusnya, apa programnya, tetapi bagaimana setiap institusi menyadari peran penting mereka dalam program ini,” pungkasnya.



# Khardung La

Foto Andi Al Hakim

Khardung La berada di puncak tertinggi dengan ketinggian 5,359 meter di atas permukaan laut dan masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dengan ketinggian yang ekstrem, daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang kurang bersahabat untuk manusia. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu, oksigen yang tipis, daerah ini justru menjadi tujuan bagi para penyuka tantangan. Perjalanan yang dilakukan akan melewati rute cukup ekstrem. Seperti saat perjalanan dari Leh menuju Khardung La, riders harus melintasi jalan berbukit, aspal rusak dan bersalju yg licin hingga jalur kecil dengan jurang curam di sisinya. Untuk itu, riders harus menyiapkan tenaga fisik dan mental yang kuat. Dalam perjalanan itu, biker harus menempuh jarak sejauh kurang lebih 40 kilometer dengan elevasi mencapai 2000 mdpl.





# Menjaga Sang Penyangga Ekonomi

Teks CS. Purwowidhu

Keandalan UMKM dalam menyokong ekonomi nasional tak perlu diragukan lagi. Sektor ini terbukti berhasil keluar dari impitan krisis ekonomi 1998 dan 2008 bahkan menjadi penyangga agar ekonomi tidak makin terpuruk kala itu. Namun pada 2020 UMKM terimbas cukup dalam akibat krisis global pandemi COVID-19. Pemerintah segera turun tangan membantu UMKM agar dapat bertahan di tengah situasi yang luar biasa ini. Menolong UMKM menjadi kunci pengungkit kebangkitan ekonomi.

Pembatasan aktivitas sosial masyarakat secara besar-besaran untuk menahan laju penyebaran virus tak ayal mempengaruhi omzet UMKM

Foto Resha Aditya



Penggunaan produk lokal akan menimbulkan multiplier effect di pasar domestik yang tak hanya dapat memutar ekonomi tapi juga bisa mengakselerasi kemajuan Indonesia

Foto Resha Aditya

**G**igih berjuang melawan tekanan krisis pada tahun 1998 dan 2008, UMKM sukses mendominasi 99 persen usaha di Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Setiap tahunnya UMKM juga menyumbang kontribusi terhadap PDB nasional rata-rata sebesar 60 persen. Per 2018, sektor ini pun turut ambil bagian dalam investasi nasional sebesar 58 persen, dan ekspor sebesar 14 persen.

Berbeda dari krisis di masa silam, perlambatan ekonomi yang terjadi pada 2020 bermula dari krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas sosial masyarakat secara besar-besaran untuk menahan laju penyebaran virus tak ayal mempengaruhi omzet UMKM. Riset LIPI Juni 2020 mencatat 94,7 persen UMKM mengalami penurunan penjualan. Belum lagi kendala penyediaan bahan baku dan pembiayaan. Dua sisi tersebut menghantam bersamaan. Akibatnya UMKM turut babak belur.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim mengungkapkan masalah yang dialami pelaku UMKM selama pandemi antara lain penjualan UMKM menurun

hingga sekitar 22,90 persen, distribusi terhambat sebesar 20,01 persen, dan permodalan sebesar 19,39 persen.

“Agar dapat bertahan di tengah kondisi tersebut, diperlukan intervensi pemerintah untuk membantu UMKM dalam tahapan *survival*, *recovery*, dan *development* pascapandemi,” tegas Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

Dalam perkembangannya pemerintah telah beberapa kali melakukan *reclusterisasi* agar program PEN untuk UMKM tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan dapat mengakomodir kebutuhan yang ada. Pemerintah mengalokasikan dukungan PEN untuk UMKM sebesar Rp115,82 triliun dengan realisasi belanja hingga 8 Desember 2020 sebesar Rp103,93 triliun atau 89,7 persen dari pagu.

#### Ragam skema

Pemerintah mengembangkan beragam skema yang disesuaikan dengan berbagai level usaha UMKM agar pelaku UMKM dapat melanjutkan kegiatan ekonomi. “Intinya bahwa pada saat UMKM sedang mengalami tekanan harus ada bantuan, pada saat dia mau menggeliat maju harus ada dorongan, dan pada saat dia ekspansi diberikan juga *support* dalam bentuk kredit,” tutur Suahasil.

“Beberapa program yang terkait langsung dengan UMKM adalah Subsidi Bunga UMKM, PPh Final UMKM, Penjaminan Modal Kerja, Penempatan Dana pada Bank yang melakukan restrukturisasi, dan Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM,” terang Ludiro selaku Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan. Dukungan terbaru juga hadir dalam bentuk program Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro.

Lebih lanjut Ludiro menjelaskan, beragam skema tersebut melibatkan sejumlah kementerian teknis. Adapun program yang pengelolaannya berada

di bawah pengawasan Direktorat SMI yang ia pimpin adalah Subsidi Bunga untuk UMKM. Alokasi anggaran program ini mencapai Rp13,43 triliun. Per 8 Desember 2020 realisasi penyaluran dana mencapai Rp7,12 triliun kepada 22,18 juta debitur melalui penyalur perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Pelaku usaha kecil, hingga lapisan terbawah sekalipun, tak luput dari bantuan pemerintah. Hingga 20 Oktober

“Semoga “Bangga buatan Indonesia” bukan sekadar jargon saat krisis pandemi selama kita ‘di rumah saja’, tapi ke depannya kita juga terus bersedia membeli produk dalam negeri”



Suahasil Nazara  
Wakil Menteri Keuangan

2020, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tercatat telah menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada 3.300.000 masyarakat penerima. Mereka juga memberi keringanan kepada penyalur dan *linkage*-nya dalam bentuk penundaan pokok dan pemberian masa tenggang pembayaran kewajiban pokok dari Maret hingga Desember 2020. Hingga akhir Oktober 2020, relaksasi tersebut telah diberikan kepada 266.000

debitur dengan *outstanding* sebesar Rp7,38 miliar.

Di samping itu PIP berperan aktif mengupayakan bagaimana debitur UMi bisa ikut mendapatkan subsidi bunga. “Jadi kita bantu mereka menyiapkan datanya, kita dampingi koperasinya untuk menyiapkan data dan administrasinya. Kemudian PIP yang menyerahkan dokumen itu ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk penyalur koperasi, dan Kementerian BUMN untuk penyalur Pegadaian dan PT PNM,” jelas Direktur Utama PIP, Ririn Kadariyah. Tak hanya itu, PIP juga mengajukan debitur UMi sebagai calon penerima BPUM sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha mikro yang kini benar-benar terhantam keras.

#### Peluang di dunia digital

Perkembangan *e-commerce* saat ini juga menjadi salah satu peluang yang sangat membantu UMKM untuk bertahan di tengah krisis pandemi karena masyarakat tetap bisa berbelanja meskipun tidak dapat keluar dari rumah. Kemenkop UKM mencatat UMKM yang mengadopsi *e-commerce* dapat meningkatkan pendapatannya hingga 120 persen dan produktivitas sampai dengan 110 persen di masa pandemi ini. Karena itu, digitalisasi UMKM perlu diakselerasi mengingat dari 64,2 juta UMKM di Indonesia, baru 16% yang menggunakan *e-commerce* untuk pemasaran produk.

PIP segera merespons kebutuhan debitur dalam ihwal tersebut. Melalui program “UMi Siap Online”, PIP mengadakan serangkaian pelatihan dan pendampingan bagi para debitur UMi. Menu program meliputi pengelolaan media sosial, pembuatan toko digital di *marketplace*, dan membuat elemen visual dari *brand* yang menarik. Kita dapat melihat kisah sukses dari program ini salah satunya lewat usaha

yang dijalankan oleh Umi Kalsum, debitur UMi yang berhasil menjangkau pelanggan di seantero Bandar Lampung Raya melalui “Nyeruit Shop” usaha yang bergerak di bidang jasa titip belanja kebutuhan pokok.

#### Ungkit daya UMKM

Suahasil memaparkan beberapa kiat bagi UMKM agar dapat bangkit. Pertama, UMKM harus memperhatikan dengan saksama segmen usaha yang ia tuju. Kemajuan teknologi akan memudahkan pelaku UMKM dalam memantau kebutuhan dan keinginan pasar. Kedua, mengakses layanan keuangan dari sektor keuangan, misalnya yang awalnya berhubungan dengan perbankan hanya untuk menabung, ke depannya menjadikan bank sebagai sumber kredit usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ketiga, memanfaatkan dukungan fasilitas dari pemerintah sesuai segmen usaha misalnya pembiayaan UMi, KUR, dan sebagainya.

“Semoga dengan begini UMKM kita tambah besar, makin solid, bisa naik kelas, bahkan sampai menjadi pengusaha kelas dunia. Itu yang kita inginkan dari evolusi suatu usaha di dalam suatu perekonomian,” harap Suahasil.

#### Gelorakan penggunaan produk lokal

Dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti sekarang ini, Suahasil mengungkapkan, secara makro ekonomi kita perlu betul-betul mendorong perekonomian domestik. Di Indonesia, konsumsi rumah tangga rata-rata berkontribusi sebesar 57 persen terhadap PDB. Populasi Indonesia yang sangat besar menjadi kekuatan dan berimplikasi pada tingginya permintaan konsumsi. Peluang ini menurut Suahasil harus dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan produk lokal. Dengan begitu akan terjadi *multiplier effect* di pasar domestik yang tak hanya dapat memutar ekonomi tapi juga bisa mengakselerasi kemajuan Indonesia.

“Semoga “Bangga buatan Indonesia” bukan sekadar jargon saat krisis pandemi selama kita ‘di rumah saja’, tapi ke depannya kita juga terus bersedia membeli produk dalam negeri,” pungkas Suahasil.





# Jalan Terang Menuju Pemulihan

Teks Reni Saptati D.I

Pemerintah bersama dewan legislatif menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dalam kondisi yang tak mudah. Pandemi membuat situasi samar, penuh hal tak terduga dan tak pasti. Meski demikian, perekonomian global dan domestik pada 2021 diproyeksikan membaik. Momentum ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperkuat reformasi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045.

APBN 2021 menjadi instrumen utama penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional

Foto iStock



Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yang sudah ditetapkan pada APBN 2021

Foto Resha Aditya

### Percepatan pemulihan ekonomi

Pandemi memberi dampak luar biasa bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian. Ekonomi nasional sangat tertekan, terutama pada triwulan kedua 2020. Memasuki triwulan ketiga, ekonomi nasional menunjukkan perbaikan. Titik balik pemulihan ekonomi pada triwulan ketiga ini tecermin dari data yang menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi di berbagai

sektor. Tahun pun telah berganti, sumber daya fiskal kini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi pemulihan yang telah dirintis tahun lalu.

APBN 2021 menjadi instrumen utama penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam dokumen tahunan tersebut, Pendapatan Negara direncanakan sebesar Rp1.743,6 triliun, yang bersumber dari Penerimaan

Perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp298,2 triliun. Sementara itu, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.750 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.954,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun. Alokasi belanja yang tinggi digunakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, di antaranya

melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dalam menyusun RAPBN 2021, tentunya pemerintah berbasis kepada kondisi dan langkah kebijakan di 2020. Penanganan masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi menjadi satu paket kebijakan yang harus didesain secara komprehensif dan sinergis. Upaya preventif di bidang kesehatan

adalah kunci penting. *Next step*-nya untuk kita maju adalah bagaimana kembali memulihkan ekonomi itu secara bertahap di tahun 2021,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Askolani.

Kebijakan pemerintah dalam APBN 2021 tetap memprioritaskan kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. “Program perlindungan sosial juga tetap berjalan, misalnya dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan tunai, dan Kartu Pra Kerja dan program subsidi,” ujar Askolani.

Anggaran kesehatan diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat pandemi, diikuti dengan upaya penguatan sistem kesehatan. Upaya preventif melalui penyediaan vaksin juga menjadi fokus utama. Faktor ketersediaan vaksin ini sangat penting lantaran menentukan langkah dan pola pemulihan. Kini vaksin sudah di depan mata, jalan menuju pemulihan kian terang benderang.

### Penguatan reformasi

Pemulihan ekonomi kian bermakna jika dilengkapi dengan reformasi struktural yang konsisten. Sebaliknya, reformasi akan berjalan efektif jika didukung proses pemulihan ekonomi yang solid. “Strategi *recovery* ekonomi dan reformasi merupakan satu paket, *two in one*, yang komplementer dan saling menguatkan, agar dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi dapat segera pulih menuju normal,” tutur Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Ubaidi S.Hamidi.

Indonesia memerlukan reformasi struktural agar mampu keluar dari *middle income trap*. Ubaidi menuturkan perlu adanya penguatan daya saing, peningkatan kapasitas produksi, dan pemanfaatan bonus demografi

### Asumsi Makro APBN 2021

Pertumbuhan Ekonomi  
**4,5-5,5%**

Inflasi  
**3%**

Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)  
**14.600**

Tingkat Bunga SBN 10 Tahun  
**7,29%**

Harga Minyak (USD/barrel)  
**45**

Lifting Minyak (rbph)  
**705**

Lifting Gas (rbsmph)  
**1.007**

untuk mendukung produktivitas dan transformasi ekonomi. “Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan, tetapi juga menjadi momentum untuk berbenah melalui reformasi struktural agar mempunyai fondasi yang lebih kuat untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju,” tegasnya.

Ubaidi mengungkapkan, setidaknya terdapat tujuh fokus reformasi pada 2021. “Pertama, reformasi kesehatan, untuk mendukung pemulihan melalui penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta mendorong *health security preparedness*,” jelas Ubaidi. Berikutnya, reformasi perlindungan sosial untuk mendukung pemulihan sekaligus mempersiapkan program yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana.

Untuk menyediakan SDM unggul yang produktif, inovatif, terampil dan berdaya saing serta *link and match* dengan pasar tenaga kerja, pemerintah juga melaksanakan reformasi di bidang pendidikan. Selain itu, fokus reformasi juga diarahkan ke TKDD, perpajakan, penganggaran, dan optimalisasi teknologi informasi melalui digitalisasi layanan publik.

“Pandemi ini memberi banyak *lesson learned* kepada kita yang menjadi masukan untuk perbaikan reformasi di berbagai bidang,” ujar Askolani. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan upaya penyempurnaan sistem penganggaran, antara lain dengan memperpendek mekanisme proses reviu atas usulan anggaran K/L sehingga dapat mempersingkat waktu penetapan DIPA.

“Kementerian Keuangan juga menyiapkan reformasi desain anggaran. Kita juga mengajak Bappenas untuk mendesain program anggaran tersebut. Jadi, format alokasi belanja K/L di tahun 2021 nanti akan mengadopsi desain anggaran yang baru yang programnya lebih simpel, lebih *eye catching*, dan

lebih mudah diterapkan. Ini kita koneksikan juga dengan target prioritas pembangunan sesuai arahan Presiden dan rencana kerja pemerintah,” ungkap Askolani.

#### Bertahan melalui kemandirian pangan

Prioritas pembangunan nasional sudah ditetapkan dalam APBN

“Pandemi ini memberi banyak *lesson learned* kepada kita yang menjadi masukan untuk perbaikan reformasi di berbagai bidang”



2021, yakni pada bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata. Ketahanan pangan telah menjadi mimpi Indonesia sejak lama, bahkan dari masa presiden-presiden terdahulu. Namun, baru kali ini gaung ketahanan pangan kembali terdengar nyaring.

Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di hadapan anggota dewan legislatif,

Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan sektor ketahanan pangan. Alokasi anggaran untuk sektor tersebut dipatok sebesar Rp104,2 triliun. Presiden juga menyampaikan tiga program utama untuk mencapai ketahanan pangan.

Fokus utama yaitu mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi. Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani, nelayan dan distribusi pangan. Langkah ketiga adalah pengembangan *food estate* untuk meningkatkan produktivitas pangan, antara lain di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua.

Penempatan ketahanan pangan sebagai program prioritas tahun 2021 bukan tak berdasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) di sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan kedua 2020. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal kedua 2020 (*q to q*). Bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 (*yoy*), sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19 persen. Pada kuartal kedua 2020, hanya sektor pertanian yang masih tumbuh positif, sedangkan sektor lainnya mengalami kelesuan.

Menurut Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, tumbuhnya sektor pertanian tak lepas dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Terlebih para ahli gencar mengingatkan pemenuhan nutrisi agar imun tubuh meningkat menghadapi virus yang sedang berkeliaran. “Kita bisa menahan untuk tidak beli ini dan itu, tetapi tidak bisa jika tidak makan. Artinya bahwa dari sektor pertanian masih akan tumbuh positif,”ujarnya yakin.

Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencapai ketahanan pangan adalah dengan menambah luas lahan tanam. Pembangunan *food estate* menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan dalam hal ini. Sebidang tanah di Kalimantan Tengah seluas 600 ribu hektare telah siap digarap bertahap. Tanah seluas 30 ribu hektare menjadi target pertama yang harus digarap pada periode 2020-2021. “Hasilnya nanti menambah pasokan dari 7,46 juta hektare lahan baku sawah yang sudah kita punya,” ucap Agung.

Membangun ketahanan pangan nasional adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Kesadaran akan hal tersebut harus dimulai dari tingkat keluarga. Jika tiap keluarga di Indonesia telah memiliki kesadaran tersebut tentu akan berpengaruh ke lingkungan yang lebih besar seperti desa, lalu ke tingkat kabupaten atau kota, naik ke level provinsi, hingga akhirnya secara nasional. Namun menurut Agung, intervensi pemerintah tetap diperlukan sampai level provinsi. “Contohnya dalam peningkatan distribusi pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Itu perlu, selain juga terus melakukan program-program kami yang telah saya sebutkan tadi,” tegas Agung.

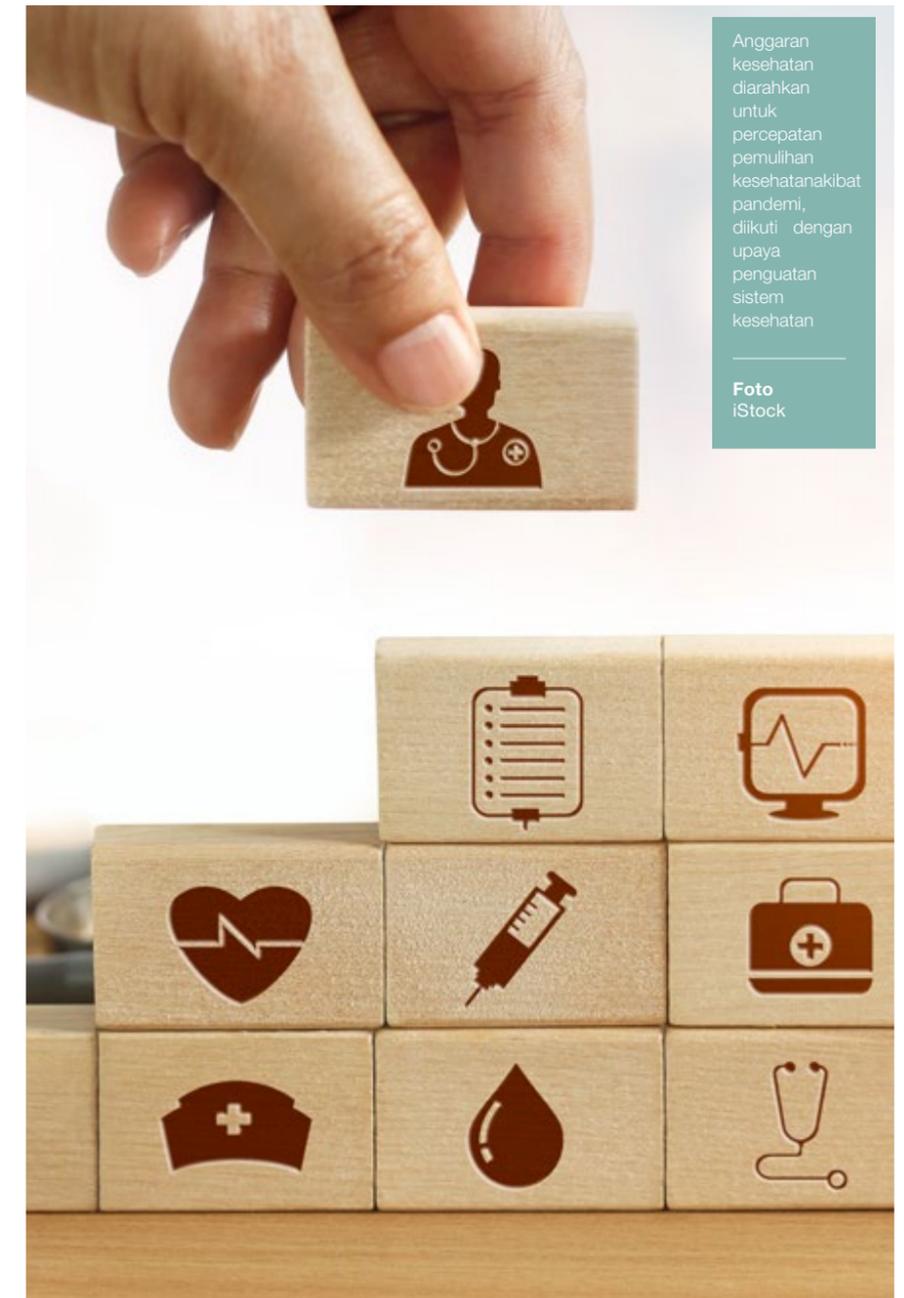
#### Topang pertumbuhan

Dirjen Anggaran Askolani menyatakan pada 2021, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, ketahanan pangan bergantung pada infrastruktur pendukung, seperti irigasi yang cukup. Sistem irigasi dibangun di antaranya dari pembangunan bendungan atau embung. Selain itu, konektivitas antardaerah akan mendukung distribusi bahan pangan yang lebih merata. “Nah, dua paket kebijakan ini tidak bisa dipisahkan,

antara prioritas ketahanan pangan dan juga pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

Upaya melanjutkan pembangunan infrastruktur ini juga terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang diproyeksikan tumbuh 4,5-5,5 persen. Anggaran infrastruktur diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. Pemerintah optimis

memperkirakan angka pertumbuhan tersebut bukan tanpa pertimbangan, tetap optimis dan realistis. “Tentunya efektivitas kebijakan PEN di 2020 ini menjadi pijakan ke depan ya. Kemudian dengan langkah fiskal ekspansif sebagaimana prediksi sejumlah lembaga internasional mengenai pemulihan ekonomi dunia di 2021, kita mendesain ekonomi kita tumbuh 4,5-5,5 persen di 2021,” pungkasnya.



Anggaran kesehatan diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat pandemi, diikuti dengan upaya penguatan sistem kesehatan

Foto iStock

# Arena Balap Nan Lengkap

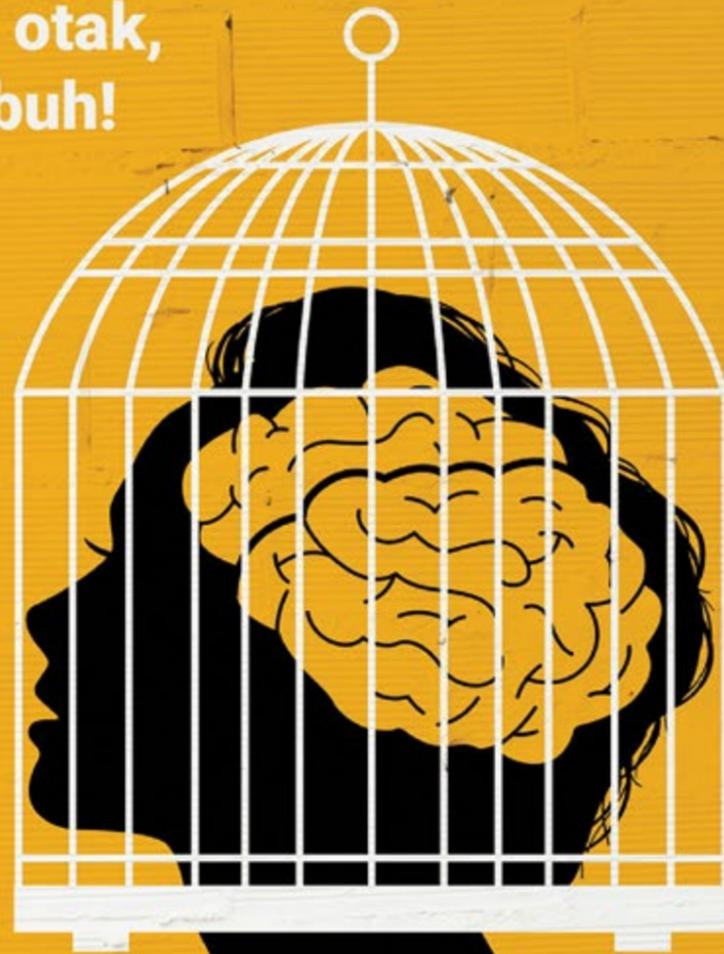
Foto dan Teks Resha Aditya Pratama

**V**elodrom adalah sebuah gelanggang untuk olahraga balap sepeda, khususnya untuk balap sepeda trek. Sebuah velodrom memiliki lintasan berbentuk oval yang dilengkapi dua tikungan 180-derajat yang memiliki kemiringan lebih curam dibandingkan lintasan lurus. Jakarta Internasional Velodrome (JIV) yang terletak di Rawamangun merupakan salah satu velodrom terbaik di ASIA tenggara dan menjadi salah satu stadium yang digunakan untuk arena balap sepeda pada perhelatan Asian Games tahun 2018 lalu. Velodrom ini memiliki kapasitas 3.500 kursi penonton untuk perlombaan balap sepeda, dan dapat bertambah hingga 8.500 kursi untuk pertunjukan dan konser. Dengan anggaran pembangunan kurang lebih mencapai Rp 665 miliar rupiah, velodrome ini memiliki berbagai fasilitas berstandar internasional dan telah mendapatkan sertifikat dari Persatuan Balap Sepeda Internasional (UCI). Salah satu kelebihan Velodrom di JIV adalah desain yang ramah lingkungan, atap bangunan yang menggunakan membran tembus cahaya sehingga bisa digunakan tanpa lampu. Saat ini, JIV bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga seperti senam, jogging, voli, bulu tangkis, dan futsal.



# JERAT NARKOBA

langsung menyerang otak,  
tak ada jaminan sembuh!



# Mas Praim

"Sudah Siap Vaksin Belum?"

Cerita : Dimach Putra    Gambar : Ditto Novenska





**TAHUN BARU MASEHI 2021**  
1 JANUARI 2021